

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN
TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pemberian dan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;

6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat tertentu dan pimpinan perguruan tinggi negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani keputusan pemberian dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan:
 - a. penerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. penerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

Pasal 2

Format Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai tercantum dalam pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

NO	UNIT KERJA/PEJABAT	MENETAPKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI UNTUK KELAS JABATAN	LINGKUNGAN
5.	Universitas/Institut a. Rektor	10 - 16	Universitas/Institut
	b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 - 9	
6.	Sekolah Tinggi a. Ketua	10 - 16	Sekolah Tinggi
	b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 - 9	
7.	Politeknik Negeri/Akademi a. Direktur	10 - 16	Politeknik Negeri/Akademi
	b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum atau sebutan lain yang setingkat	1 - 9	
8.	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta a. Koordinator	10 - 16	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
	b. Sekretaris Pelaksana	1 - 9	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 110 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Format Keputusan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan pemberian tunjangan kinerja pegawai bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada diktum Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan tunjangan kinerja pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal kepada Pegawai,

Nama :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat golongan ruang :
Jabatan :
Kelas jabatan :
Unit kerja :

diberikan tunjangan kinerja pegawai setiap bulan sebesar Rp.(....);

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

.....
NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di.....
3.
4.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Karo Hukor	Karopeg	Sesjen

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 110 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Format Keputusan Pembekhentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. berdasarkan.....(Laporan/SK/Surat/Keterangan,dll).....Nomor.....
tanggal.....mengenai.....;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada diktum Keputusan ini
memenuhi syarat untuk dihentikan pembayarannya tunjangan kinerjanya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 63 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal, Pegawai

Nama :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat golongan ruang :
Jabatan :
Kelas jabatan :
Unit kerja :

dihentikan pembayaran tunjangan kinerjanya.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
.....

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di.....
3.
4.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Karo Hukor	Karopeg	Sesjen